



**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Dede Krisnafani
022116226

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JANUARI 2022



**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA, CFE.)

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III)**

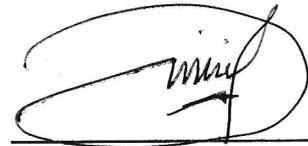
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022

Dede Krisnafani
022116226

Disetujui

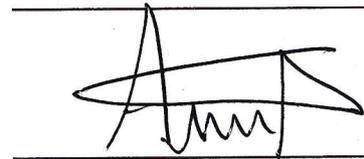
Ketua Penguji Sidang,
(Ketut Sunarta, Ak.,MM, CA.,PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Supriyanto, Ak.,M.Ak., CA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP.)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dede Krisnafani

NPM : 0221 16 226

JudulSkripsi : Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor
Wilayah DJP Jawa Barat III)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2022



Dede Krisnafani

0221 16 226

©Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

DEDE KRISNAFANI. 022116226. Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III). Di bawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan ABDUL KOHAR. 2022.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019.

Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III dengan metode observasi langsung, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* di mana penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 3 tahun dengan unit data bulanan. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Pengujian secara parsial mendapatkan hasil Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN karena Perusahaan penyedia barang dan jasa akan menekan biaya produksi, biaya operasional dan biaya pemasaran. Sehingga harga barang dan jasa akan tetap stabil dan tidak mengurangi penjualan. Sementara Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN karena tingginya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada saat perekonomian dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak pada penerimaan di sektor perpajakan salah satunya penerimaan PPN. Hasil pengujian secara simultan dapat diketahui bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Kata kunci: inflasi, pertumbuhan ekonomi, penerimaan PPN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam, yang telah memberi cahaya terang dalam hati sehingga dapat merasakan nikmatnya iman. Hanya kepada-Nya kita memohon, hanya kepada-Nya kita berserah diri dan hanya kepada-Nya pula kita kembali. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk untuk selalu berada pada jalan-Nya. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT yang selalu kurindukan perjumpaannya yaitu Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang terhadap umatnya. Rasa syukur yang tak terhingga kembali penulis haturkan kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tuhan penyejuk jiwa dan penerang hati yaitu Allah SWT karena penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III).

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ini. Perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Orang tua penulis, Ibu Eroh Rohayati dan Bapak Kasmin yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.
2. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR.P., CTCP., CPSP. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yayasan Supriatna, Meti Rohmatiah, Khoirunnisa, Ayunah, Ahmad Faisal Sidiq, dan Agni Ayudia Inara yang selalu memberikan dukungan moral dan material, serta doa agar penulis diberikan kelancaran dan kemudahan.
7. Bapak Julian yang telah membantu dalam memperoleh data dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III.
8. Seluruh staf dan anggota Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Firman Maulana Hakim, Mela Alesia Agustin, Muhammad Nur Ambiya, dan teman-teman maksimal yang telah memberikan dukungan dan doa serta selalu mengukir senyuman dalam proses pengerjaan skripsi.
10. Teman-teman kelas G Akuntansi 2016 yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bogor, Januari 2022
Penulis,

Dede Krisnafani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Praktis	7
1.4.2. Kegunaan Akademis	7
BAB II.....	8
2.1. Konsep Dasar Pajak.....	8
2.1.1. Definisi Pajak	8
2.1.2. Jenis Pajak.....	9
2.2. Pajak Pertambahan Nilai	10
2.2.1. Pengertian PPN	10
2.2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai	11
2.2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.2.4. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.2.5. Tata Cara PPN.....	13
2.2.6. Tarif PPN	14
2.2.7. Dasar Pengenaan Pajak	14
2.2.8. Cara Menghitung PPN.....	16
2.2.9. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan	16
2.3. Inflasi.....	17
2.3.1. Definisi Inflasi.....	17
2.3.2. Jenis-jenis Inflasi.....	18

2.3.3.	Indikator Inflasi	20
2.3.4.	Efek Buruk Inflasi	20
2.3.5.	Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi	21
2.4.	Pertumbuhan Ekonomi	22
2.4.1.	Definisi Pertumbuhan Ekonomi	22
2.4.2.	Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi	22
2.4.3.	Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi	23
2.4.4.	Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	24
2.5.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	25
2.5.1.	Penelitian Sebelumnya	25
2.5.2.	Kerangka Pemikiran.....	28
2.5.2.1.	Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPN	28
2.5.2.2.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN.....	28
2.5.2.3.	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN	28
2.6.	Hipotesis Penelitian	29
BAB III	30
3.1.	Jenis Penelitian	30
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	30
3.3.	Jenis dan Sumber Data	30
3.4.	Operasionalisasi Variabel.....	31
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	32
3.6.	Metode Pengumpulan Data	32
3.7.	Metode Pengolahan/Analisis Data	32
3.7.1.	Uji Asumsi Klasik.....	32
3.7.2.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
3.7.3.	Uji Hipotesis	34
BAB IV	36
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1.	Sejarah Singkat Kanwil DJP Jawa Barat III	36
4.1.2.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	37
4.2.	Hasil Pengumpulan Data	38
4.2.1.	Data Inflasi	38
4.2.2.	Data Pertumbuhan Ekonomi	39
4.2.3.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	40
4.3.	Analisis Data	41
4.3.1.	Uji Asumsi Klasik.....	41
4.3.2.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
4.3.3.	Uji Hipotesis	50
4.4.	Pembahasan	52
4.4.1.	Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)	53

4.4.2.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III).....	54
4.4.3.	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III).....	55
BAB V	56
5.1.	Simpulan.....	56
5.2.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 3. 2 Bentuk Transformasi Data	33
Tabel 4. 1 Data Inflasi pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III.....	39
Tabel 4. 2 Data Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	40
Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	40
Tabel 4. 4 Hasil uji Normalitas <i>Kolmogorov-smirnov</i> Sebelum Transformasi Data .	42
Tabel 4. 5 Hasil uji Normalitas <i>Kolmogorov-smirnov</i> Setelah Transformasi Data ...	44
Tabel 4. 6 Hasil uji Multikolinearitas	45
Tabel 4. 7 Hasil uji Glejser	46
Tabel 4. 8 Hasil uji Glejser setelah dilakukan metode <i>Weighted Least Square</i>	47
Tabel 4. 9 Hasil uji Autokorelasi	48
Tabel 4. 10 Hasil uji Autokorelasi <i>Durbin's Two-Step Method</i>	48
Tabel 4. 11 Hasil uji Analisis Regresi Linear Berganda	49
Tabel 4. 12 Hasil uji t	50
Tabel 4. 13 Hasil uji F	51
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 4. 15 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Jawa Barat III Tahun 2017-2019 (dalam triliun rupiah)	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4. 1 Hasil uji Normalitas Histogram Sebelum Transformasi Data.....	42
Gambar 4. 2 Hasil uji Normalitas Normal Probability Plot Sebelum Transformasi Data	42
Gambar 4. 3 Hasil uji Normalitas Histogram Setelah Transformasi Data.....	43
Gambar 4. 4 Hasil uji Normalitas Normal Probability Plot Setelah Transformasi Data	44
Gambar 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Gambar 4. 6 Hasil uji Heteroskedastisitas setelah dilakukan metode <i>Weighted Least Square</i>	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Inflasi perbulan pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III.....	58
Lampiran 2. Data Pertumbuhan Ekonomi perbulan pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	59
Lampiran 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur kita perlu melaksanakan pembangunan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual yang mencakup di segala bidang, dalam hal ini bidang ekonomi, membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2016: 4), peran pajak bagi negara Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulered*). Dalam fungsi anggaran (*Budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam fungsi mengatur (*Regulered*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pendapatan negara dalam satu dasawarsa terakhir masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 75,0 persen. Sedangkan, penyumbang pendapatan negara lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Dengan komposisi tersebut, kinerja pendapatan negara tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global maupun domestik. Dari sisi eksternal, pendapatan negara dipengaruhi diantaranya oleh volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara.

Salah satu jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). PPN yang merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke

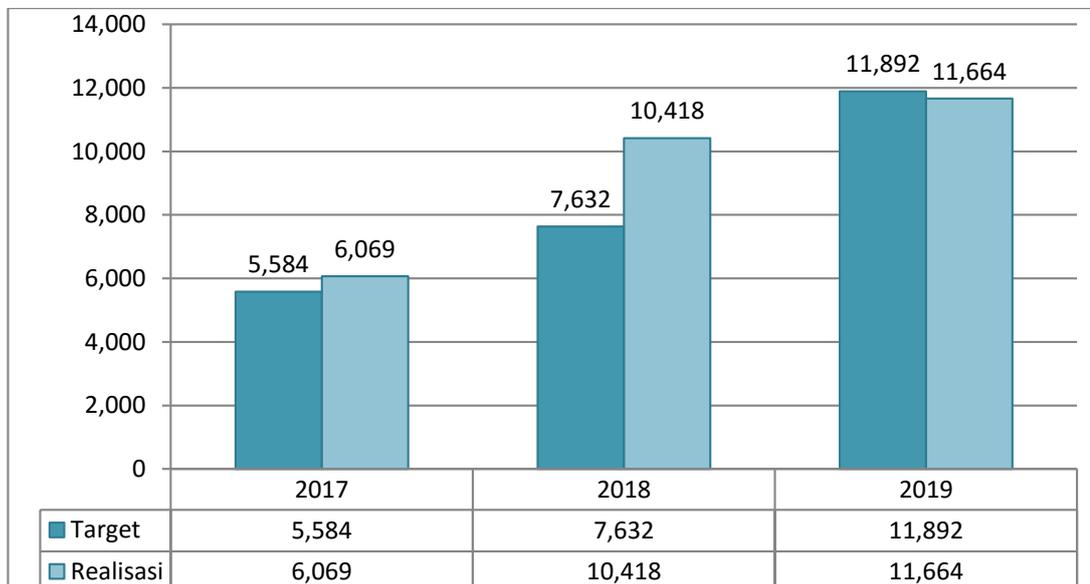
konsumen. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu komoditi dan dipungut pada setiap tahapan produksi, PPN hanya mempunyai satu macam tarif untuk berbagai kelompok komoditi. Dengan demikian, maka pembagian beban pajak akan lebih merata karena setiap produk yang dijual dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama. Menurut Schenk dan Oldman (2001) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi. Menurut Aizenman dan Jinjark (2005) PPN sebagai penyumbang pendapatan terbesar kedua dari sistem perpajakan pada lebih dari 136 negara, PPN meningkat sekitar seperempat dari penerimaan pajak dunia. Menurut Ajakaiye (2000) PPN telah menjadi sumber penerimaan di banyak negara berkembang. Beberapa negara Afrika seperti Guinea, Kenya, dan Madagaskar. Bukti ini menunjukkan bahwa PPN telah menjadi kontributor penting untuk penerimaan pajak di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Pendapatan PPN dan PPnBM di Indonesia mengalami perlambatan dalam periode 2015-2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,8 persen per tahun. Perlambatan pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak mulai pertengahan tahun 2018. Dalam APBN tahun 2019, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp655.394,9 miliar, naik 22,0 persen dari tahun 2018. Namun dengan mempertimbangkan adanya perlambatan impor yang terjadi di sepanjang tahun 2019, target realisasi PPN dan PPnBM mengalami penurunan sebesar 9,6 persen dari APBN 2019 menjadi sebesar Rp592.790,0 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp382.546,1 miliar, pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp210.195,6 miliar dan pendapatan PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp48,3 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak maupun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar penerimaan PPN selalu meningkat, untuk menjaga agar target PPN dan PPnBM tetap tercapai selama periode 2017-2019, Pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain pembenahan sistem administrasi PPN seperti pembenahan pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak. Selain itu, Pemerintah juga berupaya melakukan peningkatan impor untuk mempengaruhi capaian PPN tahun 2020 seperti yang terjadi pada periode tahun 2019. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan dampak positif dari dukungan perbaikan administrasi perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan *online (e-service)* seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-bukpot*.

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III memiliki wilayah kerja dengan cakupan daerah yang termasuk ke dalam daerah penyangga ibukota seperti kota Bogor, kabupaten Bogor, kota Depok, dan kota Bekasi. Wilayah Bodetabek sebagai wilayah penyangga kota Jakarta diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melihat Bogor sebagai kota wisata

dan jasa serta Bekasi sebagai kota industri. Akan tetapi besarnya peranan PPN untuk membiayai pembangunan dan perekonomian rakyat belum maksimal dan sesuai harapan. Terlihat pada perbandingan realisasi dan target penerimaan PPN di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III tahun 2017-2019 sebagai berikut:



Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, (data diolah penulis) 2020

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Jawa Barat III Tahun 2017-2019 (dalam triliun rupiah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan PPN dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat. Akan tetapi, realisasi penerimaan PPN yang mampu melampaui target yang telah ditentukan hanya dicapai pada tahun 2017 dan 2018 saja. Pencapaian penerimaan PPN pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp6.1 triliun dengan target yang ingin dicapai adalah Rp5.5 triliun. Pada tahun 2018, target penerimaan PPN ditingkatkan menjadi Rp7.6 triliun. Serta realisasi penerimaan PPN yang sesuai harapan dan kembali melampaui target dengan realisasi sebesar Rp10.4 triliun. Melihat trend positif pada dua tahun sebelumnya, target penerimaan PPN pada tahun 2019 kembali ditingkatkan menjadi Rp11.8 triliun. Akan tetapi, realisasi penerimaan PPN sebesar Rp11.6 triliun bahkan tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III belum maksimal.

Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba meneliti mengenai variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian Herna Renata, Kadarisman Hidayat, dan Bayu Kaniskha (2016) menunjukkan hasil bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Penelitian Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, sedangkan inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Penelitian Desy Kurnianingsih (2017) menunjukkan hasil bahwa inflasi berkorelasi sangat erat terhadap penerimaan PPN.

Penelitian Dewa Made Arta Wijaya (2013) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan PPN, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penerimaan PPN, tetapi beberapa penelitian lain menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut peneliti memilih untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel makro ekonomi yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua variabel tersebut digunakan karena menjadi faktor penting dalam makro ekonomi. Menurut Nota Keuangan beserta APBN TA (2020) upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PPN adalah dengan mendorong konsumsi rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat diasumsikan bahwa PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan vital bagi keberlangsungan negara maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan konsumsi yaitu PPN tetap selalu terjaga penerimaannya.

Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro negara. Fluktuasi ekonomi makro dapat menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan perekonomian. Jika fluktuasi ekonomi tersebut terus berlangsung maka akan menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case and Fair, 2007:57). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Inflasi mempengaruhi variabel makro ekonomi seperti ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan serta inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Vito Tanzi (1977), Sinaga (2010) dan Kusmono (2011) dimana tingkat inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan menurut David G and Bernard J (1977) mengatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi baik pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Tingkat inflasi pun dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Terkendalnya laju inflasi berperan

penting dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal.

Rata-rata tingkat inflasi per tahun yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015-2018 sebesar 3,27 persen (Nota Keuangan beserta APBN TA 2020), tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,6 persen. Pencapaian laju inflasi akan terus dijaga di tahun 2019 melalui konsistensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran tahun berjalan. Hingga Juli 2019, laju inflasi masih dapat dijaga sebesar 2,4 persen (*ytd*) atau 3,3 persen (*yoy*) didukung oleh terkendalinya inflasi seluruh komponen pada tingkat yang stabil dan rendah.

Pada tahun 2020, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan mencapai sebesar Rp685.874,9 miliar atau meningkat sebesar 15,7 persen dari target dalam *outlook* APBN tahun 2019. Target pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2020 tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp442.575,6 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp243.179,7 miliar serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp119,5 miliar. Peningkatan target PPN dan PPnBM dalam tahun 2020 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh upaya Pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Myles (2000) pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman (1961), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat dan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak. Menurut Heady (2000) seperti yang dikutip Gunawan (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penerimaan pajak. Izedonmi dan Okunbor (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan PPN.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Produk Domestik Bruto menunjukkan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan (Velaj dan Prendi, 2014).

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)”. Alasan penulis melakukan penelitian pada tempat tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari aspek geografis dan demografis, wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III memiliki beberapa hal yang spesifik. Sebagian besar wilayahnya

merupakan daerah pemukiman, perkotaan dan perdagangan. Kedua, wilayah kerja dari Kanwil DJP Jawa Barat III merupakan daerah penyangga ibukota yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat dibandingkan dengan wilayah lain. Ketiga, kota Bogor, kabupaten Bogor, kota Depok, dan kota Bekasi memiliki potensi perpajakan yang sangat besar.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, inflasi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, secara otomatis akan meningkatkan harga jual, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai. Meningkatnya dasar pengenaan pajak PPN inilah yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan indikator Produk Domestik Bruto, laju pertumbuhan PDB yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran negara yang semakin meningkat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDB berarti meningkatkan daya beli masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat mengakibatkan naiknya penerimaan pajak yaitu PPN, karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Akan tetapi, penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada tahun 2019 belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun pada dua tahun sebelumnya mampu melampaui target yang telah ditentukan.

1.2.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara Inflasi yang akan berdampak pada naiknya harga jual dan Pertumbuhan Ekonomi yang akan berpengaruh pada penerimaan negara di sektor perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Barat III pada periode 2017-2019?

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan input bagi instansi terkait dalam hal ini Kanwil DJP Jawa Barat III, sehingga dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang berkenaan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan penerimaan PPN. Selain itu penelitian ini juga berguna secara teknis untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan serta mencari solusi bagi pemecahan masalah pada penelitian.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan, dan wawasan baru bagi masyarakat untuk menjelaskan dan menggambarkan teori daya beli penerimaan PPN dimana semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin besar pajak yang dibebankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP, adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016: 1), dinyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014: 6): adalah sebagai berikut:

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan ketiga definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan demikian pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara. Dalam perundang-undangan pajak negara kita ditegaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga dalam pembangunan nasional. Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
2. Kepada kas negara. Pajak dibayarkan kepada kas negara melalui badan-badan yang ditunjuk pemerintah. Jadi, suatu pembayaran oleh negara yang tidak ditujukan kepada kas negara bukanlah pajak.
3. Berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaannya pajak dipungut berdasarkan UU serta peraturan-peraturan, dalam arti negara mempunyai hak memungut pajak kepada warganya namun pelaksanaannya memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui UU. Setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi UU, jika tidak maka akan dikenakan sanksi.

4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Dalam arti bahwa jasa timbal balik atau kontraprestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung kepada rakyatnya.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yang mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 7), pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2. Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1. Pengertian PPN

Menurut Mardiasmo (2011: 294) Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa PPN ialah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan di dalam negeri (didalam daerah pabean), dengan demikian PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dan dikenakan pada setiap rantai produksi dan industri. Akan tetapi pengenaan PPN adalah menganut *Indirect Substation Method/Invoice Method*, yaitu pajak yang terutang yang dihitung dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK). Oleh karena itu di dalam metode pengkreditan dituntut adanya alat bukti yang dinamakan faktur pajak (*Tax Invoice*) sebagai bukti pembayaran pajak pada setiap transaksi pembelian.

Undang-undang PPN tidak membahas secara jelas definisi PPN, yang diatur adalah cara pemungutan PPN. Pengertian Pajak Masukan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN barang dan jasa dan atau PPnBM pasal 1 ayat 24 adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. Sedangkan untuk Pajak Keluaran menurut Undang-undang yang sama pasal 1 ayat 25 adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor, dengan demikian pajak yang disetor ke kas negara adalah selisih dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

2.2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN sesuai dengan diberlakukannya UU yang baru, UU No. 42 Tahun 2009 mengalami perubahan dan berlaku mulai 1 April 2010. Objek PPN dikenakan pada:

1. Pengusaha melakukan penyerahan BKP didalam Daerah Pabean.
2. Impor BKP.
3. Pengusaha melakukan Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud baik didalam maupun luar Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP baik didalam maupun luar Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud dari PKP.
7. Ekspor BKP Tak Berwujud dari PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

2.2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2017) pihak atau subjek yang harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yaitu:

1. PKP menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean serta melaksanakan pengiriman barang atau jasa (ekspor) yang terkena pajak atau barang tidak berwujud ataupun berwujud.
2. Pengusaha Kecil memilih supaya dikukuhkan menjadi PKP Maksudnya pengusaha kecil menyerahkan BKP/JKPnya dan jumlah dari peredaran atau penerimaan brutonya dibawah Rp 600.000.000,- pertahun. Pengusaha tersebut menginginkan supaya dikukuhkan sebagai PKP, dan selanjutnya harus melaksanakan kewajiban layaknya Pengusaha Kena Pajak.

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, dan huruf e serta pasal 16C UU PPN. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan PPN adalah

1. Siapapun yang mengimpor BKP (pasal 4 huruf b)
2. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
3. Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak bewujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2.2.4. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum PPN adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah, yaitu:

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan;
2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C namun tidak berurutan.
3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16F.

Pada tanggal 4 Januari 2012 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU PPN 1984 setelah perubahan ketiga dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Adapun yang menjadi latar belakang pengundangan Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. UU Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan undang-undang tentang perubahan ketiga terhadap UU PPN 1984 telah berlaku sejak 1 April 2010;
2. Sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sudah tidak memadai lagi.

Seiring dengan latar belakang tersebut, maka pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dimaksudkan sebagai:

1. Peraturan pelaksanaan UU PPN 1984 setelah perubahan ketiga sehingga ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 dapat dilaksanakan lebih optimal;
2. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.

Berdasarkan perkembangan pada awal tahun 2012 tersebut, maka sebagai dasar hukum PPN Indonesia sejak 4 Januari 2012 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009;
2. Peraturan pelaksanaan yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2001 yang belum diganti sehingga masih tetap berlaku sepanjang materinya tidak bertentangan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang telah beberapa kali diubah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor dan Penyerahan BKP/JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang mengatur tentang

Impor dan Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan masih ada beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang fasilitas di bidang PPN.

2.2.5. Tata Cara PPN

1. Saat Pajak Terutang

Saat terutang PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
- b. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- c. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh PKP.
- d. Terutangnya pajak atas penyerahan barang kena pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya.
- e. Terutangnya pajak atas impor barang kena pajak terjadi pada saat barang kena pajak itu dimasukkan kedalam daerah pabean.
- f. Terutangnya pajak atas ekspor barang kena pajak terjadi pada saat barang kena pajak dikeluarkan dari daerah pabean.
- g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran terjadi.
- h. Terutangnya pajak atas penyerahan barang kena pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha tetap atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya aktiva yang berkenaan oleh notaris.

2. Tempat Pajak Terutang

Menurut Djuanda (2002: 59), yang menjadi tempat dikenakan PPN yaitu:

- a. Tempat Pajak Terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat

kedudukan dan tempat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Tempat Pajak Terutang atas:

- 1) Impor Barang Kena Pajak adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- 2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah di tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dalam hal orang pribadi atau badan tersebut bukan sebagai Wajib Pajak atau di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- 3) Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau bukan oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
- 4) Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pajak terutang atas ekspor Barang Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

2.2.6. Tarif PPN

Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

2.2.7. Dasar Pengenaan Pajak

Mardiasmo (2011:285) mengemukakan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Harga Jual

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Nilai Penggantian

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Eksportir.

5. Nilai Lain

Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. 03/2010 tanggal 31 maret 2010, yaitu:

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor;
- b. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi harga laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Untuk Penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. Untuk persediaan Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati pedagang perantara dan pembeli;
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.2.8. Cara Menghitung PPN

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengenai UU Cara Penghitungan PPN Pasal 9 dijelaskan bahwa:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (yaitu tarif PPN) dan DPP (UU PPN Pasal 9 ayat 1).
2. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. (UU PPN Pasal 9 Ayat 2).
 - a. Dalam hal ini belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. (UU PPN Pasal 9 Ayat 2a).
 - b. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. (UU PPN Pasal 9 Ayat 3).

Menurut Waluyo (2011:21) Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengkalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk Ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN yang Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.2.9. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPN 1984 prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan dirinci secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. (Pasal 9 Ayat 2).

- 2) Bila belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. (Pasal 9 Ayat 2).

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran) melakukan penyerahan kena pajak belum dibebankan sebagai biaya. Kegunaan mengkreditkan Pajak Masukan sama dengan upaya untuk memperoleh kembali PPN yang telah dibayarkan. Apabila Pajak Masukan ini dibebankan sebagai biaya maka unsur Pajak Masukan akan menambah nilai jual barang dagangan, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bila:

1. Pajak Masukan (PM) yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
2. Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Adapun pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha antara lain, pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, *jeep*, *station wagon*, *van* dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Perolehan BKP/JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana, karena Faktur Pajak Sederhana isinya tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang terdapat pada Faktur Pajak yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 5.
5. Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

2.3. Inflasi

2.3.1. Definisi Inflasi

Sukirno (2011:165) menyatakan bahwa: "Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus".

Selanjutnya menurut Murni (2013:202) menyatakan bahwa: "Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus".

M. Natsir (2014:253) menyatakan bahwa: "Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus".

Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang, misalnya: seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Contohnya adalah kenaikan harga BBM, karena BBM merupakan komoditas strategis maka kenaikan harga BBM akan merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain. Bahkan kenaikan BBM akan mengundang kaum buruh untuk menuntut kenaikan upah harian untuk memelihara daya beli mereka.

3. Berlangsung Terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi minimal dilakukan dalam rentang waktu bulanan. Sebab dalam waktu sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10% berarti akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2,5% ($10\%:4$), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% ($10\%:12$).

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. (wikipedia, 2007)

2.3.2. Jenis-jenis Inflasi

Menurut M. Natsir (2014:261) jenis-jenis inflasi yaitu:

1. Inflasi secara umum, terdiri dari:

- a. Inflasi IHK atau inflasi umum (*headline inflation*) adalah inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi IHK merupakan gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi dan inflasi gejolak barang (*volatile goods*).
- b. Inflasi inti (*core inflation*) adalah inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental misalnya akseptasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum yang sifatnya cenderung permanen dan persisten.

- c. Inflasi harga administrasi (*administered price inflation*) adalah inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah terjadi karena campur tangan (diatur) pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM, angkutan dalam kota dan kenaikan tarif tol.
 - d. Inflasi gejolak barang-barang (*volatile goods inflation*) adalah inflasi kelompok komoditas (barang dan jasa) yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Misalnya, bahan makanan yang bergejolak terjadi pada kelompok bahan makanan yang dipengaruhi faktor-faktor teknis, misalnya gagal panen, gangguan alam atau anomali cuaca.
2. Inflasi berdasarkan asalnya, terdiri dari:
 - a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, adalah inflasi barang dan jasa secara umum di dalam negeri.
 - b. Inflasi yang berasal dari mancanegara, adalah inflasi barang dan jasa (barang dan jasa yang diimpor) secara umum di luar negeri.
 3. Inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya, terdiri dari:
 - a. Inflasi tertutup (*closed inflation*) adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu.
 - b. Inflasi terbuka (*open inflation*) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum.
 4. Inflasi berdasarkan sifatnya, terdiri dari:
 - a. Inflasi merayap (*creeping inflation*) adalah inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan persentase yang relatif kecil serta dalam waktu yang relatif lama.
 - b. Inflasi menengah (*galloping inflation*) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan seringkali berlangsung dalam periode waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
 - c. Inflasi tinggi (*hiper inflasi*) adalah inflasi yang paling parah ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, pada saat ini nilai uang merosot tajam.
 5. Inflasi berdasarkan tingkat pengaruhnya
 - a. Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya <10% per tahun.
 - b. Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun.
 - c. Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun.
 - d. Inflasi hiper adalah yang besarnya >100% per tahun.
 6. Inflasi berdasarkan periode, terbagi menjadi tiga, antara lain:

- a. Inflasi tahunan (*year on year*), yaitu mengukur IHK periode bulan ini terhadap IHK di periode bulan yang sama di tahun sebelumnya.
- b. Inflasi bulanan (*month to month*), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK bulan sebelumnya.
- c. Inflasi kalender atau (*year to date*), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK awal tahun.

2.3.3. Indikator Inflasi

Menurut Rahardja (2004: 164) indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui inflasi selama satu periode tertentu adalah dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weighted*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota propinsi-propinsi di Indonesia. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung IHK:

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\%$$

IHK adalah hal yang paling sering dikaitkan apabila terjadi inflasi, di mana semakin tinggi nilai IHK maka akan semakin cepat juga laju inflasi. Hal ini disebabkan karena IHK dan inflasi digunakan oleh pemerintah untuk menentukan batasan dari harga jual produk agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga maksimum di mana akan melindungi pihak konsumen serta harga minimum untuk melindungi pihak produsen. Selain itu, digunakannya IHK sebagai indikator inflasi karena barang dan jasa yang masuk ke dalam perhitungan IHK adalah barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat. Terdiri dari 8 kelompok besar, yaitu makanan, perumahan, pakaian, transportasi, biaya perawatan medis, rekreasi, pendidikan, serta barang dan jasa lainnya.

2.3.4. Efek Buruk Inflasi

Menurut Sukirno (2004 :338), efek-efek buruk dari inflasi yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya banyak pengangguran akan terwujud. Kenaikan harga-harga juga menimbulkan efek buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang di negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, selanjutnya ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor yang dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.

2. Inflasi dan Kemakmuran Rakyat

Disamping menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek terhadap individu dan masyarakat.

- a. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun.
- b. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.
- c. Memperburuk Pembagian Kekayaan

Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual/pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.

2.3.5. Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004: 354), kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu:

1. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah

2. Kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit
3. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi

2.4. Pertumbuhan Ekonomi

2.4.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa pakar ekonomi sudah pernah menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sumber, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Simon Kuznets

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait.

Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai: “Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”.

Menurut Budiono (2013)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Menurut Adam Smith

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat.

2.4.2. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat enam karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Ke enam ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat.
2. Perkembangan produktivitas masyarakat.
3. Pertumbuhan tingkat struktural yang melesat.

4. Tingkat urbanisasi yang tinggi.
5. Adanya ekspansi pada negara maju.
6. Terjadi arus barang, modal dan manusia di berbagai negara.

2.4.3. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*” mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000: 53).

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain:

a. Pertumbuhan Output Total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu:

1) Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah)

Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

2) Sumber daya insani (jumlah penduduk)

Sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

3) Stok barang modal

Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumber daya alam).

b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja (Suryana, 2000: 53-55).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan (Arsyad, 1999: 61-62).

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah tenaga kerja dan kapital (modal). Modal bisa dalam bentuk *finance* atau barang modal. Penambahan jumlah tenaga kerja dan modal dengan faktor-faktor produksi lain, misalnya tingkat produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut atau secara keseluruhan tetap akan menambah output yang dihasilkan. Persentase pertumbuhan output bisa lebih besar (*decreasing return to scale*) dibandingkan persentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut (Tambunan, 2001: 7).

Model pertumbuhan yang didasarkan pada model pertumbuhan neo-klasik ini memiliki kelemahan. Model tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa di banyak negara di dunia pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada yang diperkirakan dalam model ini. Hal ini bisa terjadi, karena model pertumbuhan neo-klasik hanya melihat pada satu sumber saja, yaitu kontribusi dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi. Dengan demikian, banyak faktor produksi lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut, ternyata sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Salah satunya yang paling penting adalah teknologi. Dalam model di atas faktor teknologi dianggap konstan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model (Tambunan, 2001: 9).

2.4.4. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara

terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) dan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*). Namun pada penelitian ini, pengukuran pertumbuhan ekonomi hanya menggunakan indikator produk domestik bruto. Karena penelitian ini hanya dilakukan pada suatu wilayah tertentu.

Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) adalah caramenghitung pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Artinya, semua produksi yang terjadi dan dilakukan di wilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, tergolong ke dalam perhitungan PDB. Begitupun sebaliknya pada pendapatan atau kegiatan produksi dari warga negara sendiri di wilayah negara lain tidak akan dimasukkan dalam perhitungan PDB. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB adalah dengan membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya.

$$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t

PDB_t = Produk Domestik Bruto periode t

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya

2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
1	Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat dan Bayu Kanishka (2016) Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)	Variabel independen: 1. Inflasi 2. Nilai Tukar Rupiah 3. Pengusaha Kena Pajak Variabel dependen: Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian dari tingkat inflasi adalah koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,215 menunjukkan inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Untuk nilai tukar rupiah, koefisien regresi bernilai negatif sebesar - 2,119 menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1 2016 <i>perpajakan.student.ub.ac.id</i>

				Sementara jumlah PKP, koefisien regresi bernilai positif sebesar 13,190 menunjukkan jumlah PKP mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.	
2	Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali)	Variabel independen: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi Variabel dependen: Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linear berganda (<i>multiple regression</i>)	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN, sedangkan inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Artinya jika terjadi inflasi mengakibatkan kuantitas barang yang dihasilkan menurun tetapi harga barang meningkat, maka penerimaan PPN akan tetap sama.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.2. Februari (2018): 1530-1556
3	Oktiya Damayanti, Suhadak dan Maria Goretti Wi Endang Nirowati Pamungkas (2016) Pengaruh Tingkat Inflasi, <i>Economic Growth</i> , dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-negara Asia	Variabel independen: 1. Inflasi 2. <i>Economic Growth</i> 3. Tarif Pajak Variabel dependen: Penerimaan Pajak	Analisis regresi linear berganda (SPSS 22)	Tingkat inflasi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Begitupun dengan <i>economic growth</i> berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Serta untuk tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia.	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1 2016 <i>perpajakan.student.ub.ac.id</i>
4	Mispiyanti dan Ika Neni Kristanti (2017) Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas,	Variabel independen: 1. PDRB 2. Inflasi 3. Nilai Kurs 4. Tenaga Kerja Variabel dependen: Penerimaan Pajak	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian dan diskusi mengenai analisis Pengaruh PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas,	<i>Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28</i>

	Purbalingga, Kebumen, dan Purworejo			Purbalingga, Kebumen dan Purworejo, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu secara parsial, PDRB dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Sedangkan inflasi dan nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.	Oktober 2017 (hal 219-233)
5	Desy Kurnianingsih (2017) Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jawa Barat I	Variabel independen: Inflasi Variabel dependen: Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi sederhana, analisis korelasi dan koefisien determinasi	Berdasarkan penelitian diketahui bahwa inflasi berkorelasi sangat erat terhadap penerimaan PPN. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan korelasi pearson sebesar 0,981 dengan koefisien determinasi 92,20% menunjukkan bahwa 96,20% penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh inflasi, sedangkan sisanya yaitu 3,80% penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.	Program Studi Komputerisasi Akuntansi POLITEKNIK PIKSI GANESHA BANDUNG

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah variabel-variabel yang digunakan. Yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen, dan pajak pertambahan nilai sebagai variabel dependen. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018), dan Desy Kurnianingsih (2017). Penelitian lain di atas juga memiliki persamaan pada variabel dependennya. Serta metode analisis yang

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu seperti nilai tukar rupiah, pengusaha kena pajak, tarif pajak, nilai kurs, dan tenaga kerja. Periode data yang diteliti juga berbeda karena penelitian yang akan dilakukan meneliti data pada periode 2017-2019. Beberapa penelitian di atas juga memiliki subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan Oktiya Damayanti, Suhadak dan Maria Goretti Wi Endang Nirowati Pamungkas (2016), serta Mispianiti dan Ika Neni Kristanti (2017).

2.5.2. Kerangka Pemikiran

2.5.2.1. Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPN

Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPN yaitu jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang mana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN. Harga produksi yang tinggi juga akan tertutupi oleh harga barang dan jasa yang diproduksi menjadi lebih tinggi. Terutama apabila barang dan jasa yang ditawarkan tetap dibeli oleh masyarakat karena alasan kebutuhan. Hal ini akan meningkatkan penerimaan PPN. Akan tetapi, tingginya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli akan menurunkan produksi suatu perusahaan sehingga penghasilan kena pajak akan menurun. Menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat disebabkan oleh menurunnya pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap karena pada umumnya kenaikan upah tidak akan secepat kenaikan harga-harga sehingga orang-orang cenderung melakukan *saving* pada saat terjadi inflasi karena nilai riil dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku (Sukirno, 2012).

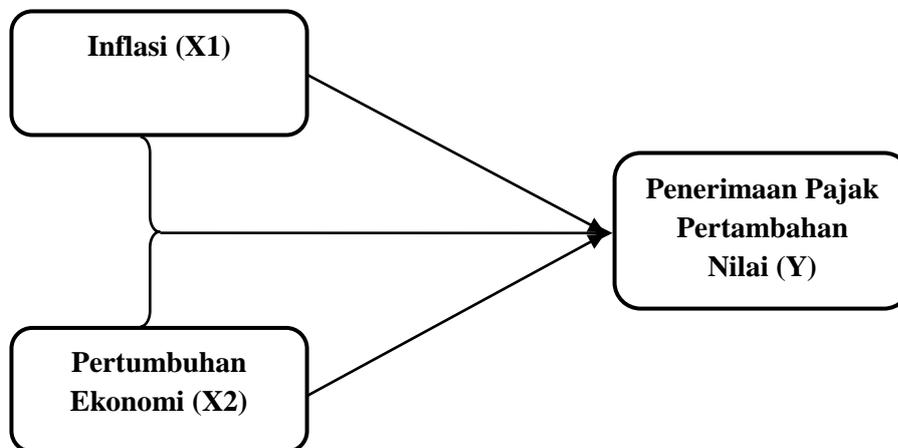
2.5.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara khususnya peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Semakin tinggi aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada saat perekonomian dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya berdampak baik bagi produsen dan konsumen tetapi juga bagi penerimaan negara, khususnya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan salah satunya penerimaan PPN.

2.5.2.3. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN

Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel ekonomi makro yang merupakan faktor eksternal yang diperlukan untuk menjaga kestabilan kegiatan ekonomi negara. PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Kegiatan konsumsi

bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut dengan pengolahan data. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis 2 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis 3 : Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian verifikatif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. Menurut Sugiyono (2018:92), rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sugiyono (2018:93) menambahkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, di sini ada variabel independen (yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi) Penelitian ini menguji pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel-variabel makro ekonomi yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai variabel dependen (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III).

b. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa organisasi, yaitu data mengenai pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kanwil DJP Jawa Barat III.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.64, RT.01/RW.13, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka (skala rasio), dan data yang diperoleh merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2018). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Data penerimaan PPN diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Barat III selama 36 bulan terhitung Januari 2017-Desember 2019. Kemudian data inflasi yang digunakan adalah inflasi perubahan *month to month* periode Januari 2017-Desember 2019 yang dinyatakan dalam persen.

Dan data pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Data ini diperoleh dari situs internet resmi badan pusat statistik (BPS) seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III. Yaitu BPS Kabupaten Bogor (bogorkab.bps.go.id), BPS Kota Bekasi (bekasikota.bps.go.id), BPS Kota Bogor (bogorkota.bps.go.id), BPS Kota Depok (depokkota.bps.go.id), serta BPS Provinsi Jawa Barat (jabar.bps.go.id). Data yang diperoleh berupa data PDRB tahunan periode 2017-2019. Data PDRB diubah dengan menggunakan metode interpolasi dengan merubah periode tahunan menjadi bulanan.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas X (*independent variable*) dan variabel terikat atau variabel Y (*dependent variable*).

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen			
Inflasi (X1)	Indeks harga konsumen	$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Bruto	$G_t \frac{\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1}}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Dependen			
Penerimaan PN (Y)	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018: 118). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan dalam *nonprobability sampling* adalah *sampling jenuh* dimana penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 3 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 36 buah.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data, serta metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan dengan cara menghubungi pihak yang memiliki data, dokumentasi dan studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari Kanwil DJP Jawa Barat III. Selain itu juga mendapatkan data dari seluruh situs internet resmi BPS pada wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018: 285), teknik analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 161), uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk grafik histogram yaitu jika grafik menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk grafik *normal probability plot* adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi mengikuti asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Namun, Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistika dapat sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistika non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis.

- a. Jika residual memiliki signifikansi $> 5\%$ maka residual berdistribusi normal
- b. Jika residual memiliki signifikansi $< 5\%$ maka residual berdistribusi tidak normal

Jika signifikansi $< 0,05$ berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan signifikan dengan data normal, berarti data tersebut tidak normal. Menurut Ghazali (2018), data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. Data yang ditampilkan pada laporan tetap data asli, sedangkan data transformasi hanya membantu membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi analisis ragam. Bentuk transformasi yang dilakukan mengacu pada bentuk grafik histogram dari data yang tidak terdistribusi normal. Berikut ini merupakan bentuk transformasi yang dapat dilakukan sesuai dengan grafik histogram:

Tabel 3. 2 Bentuk Transformasi Data

Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi
<i>Moderate positive skewness</i>	SQRT (x) atau akar kuadrat
<i>Subtansial positive skewness</i>	LG10 (x) atau logaritma 10 atau LN
<i>Severe positive skewness</i> bentuk L	1/x atau <i>inverse</i>
<i>Moderate negative skewness</i>	SQRT (k - x)
<i>Subtansial negative skewness</i>	LG10 (k - x)
<i>Severe negative skewness</i> bentuk J	1/(k - x)

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas. Menurut Ghazali (2018: 105), tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik memiliki model yang di

dalamnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dapat dikatakan bebas dari problem multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan tol > 0,1.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018: 135) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama maka disebut homoskedastitas. Sebaliknya, jika variansnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat *Scatterplot*. Yaitu jika pola titik yang dihasilkan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yang artinya tidak terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke yang lain.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series), karena sampel atau observasi tertentu cenderung dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan cara melakukan uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali,2018). Berdasarkan ketentuan pengujian, model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi apabila $du \leq d \leq 4 - du$.

3.7.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh hubungan antara beberapa variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	=	Variabel Dependen (Penerimaan PPN)
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
X_1	=	Variabel Independen (Inflasi)
X_2	=	Variabel Independen (Pertumbuhan Ekonomi)
e	=	Error

3.7.3. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Dengan mengidentifikasi t hitung atas t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka terjadi pengaruh secara parsial.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Dengan mengidentifikasi F hitung atas F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka terjadi pengaruh secara simultan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kanwil DJP Jawa Barat III

Kanwil DJP Jawa Barat III dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jawa Barat III merupakan pecahan dari Kanwil DJP Jawa Barat II, dengan wilayah kerja meliputi wilayah administratif Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Pemecahan Kanwil dilakukan mengingat luasnya wilayah kerja dan jumlah wajib pajak. Sebelum pemecahan, jumlah wajib pajak yang harus diawasi adalah sebanyak 3.842.267 WP di lingkup 8 Kabupaten dan 4 Kota pada 17 Kantor Pelayanan Pajak.

Saat Mulai Operasi (SMO) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-134/PJ/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2015 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah hari Senin, 5 Oktober 2015 dengan Kantor Pelayanan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Cibinong (wilayah kerja meliputi 9 Kecamatan di Kabupaten Bogor) KPP Pratama Bogor (wilayah kerja meliputi 5 Kecamatan di Kota Bogor).
2. KPP Pratama Bekasi Utara (wilayah kerja meliputi 2 Kecamatan di Kota Bekasi)
3. KPP Pratama Depok Cimanggis (wilayah kerja meliputi 5 Kecamatan di Kota Depok)
4. KPP Pratama Bekasi Barat (wilayah kerja meliputi 2 Kecamatan di Kota Bekasi)
5. KPP Pratama Bekasi Selatan (wilayah kerja meliputi 4 Kecamatan di Kota Bekasi)
6. KPP Pratama Ciawi (wilayah kerja meliputi 24 Kecamatan di Kabupaten Bogor)
7. KPP Pratama Cileungsi (wilayah kerja meliputi 7 Kecamatan di Kabupaten Bogor)
8. KPP Pratama Pondok Gede (wilayah kerja meliputi 4 Kecamatan di Kota Bekasi)
9. KPP Pratama Depok Sawangan (wilayah kerja meliputi 6 Kecamatan di Kota Depok)
10. KPP Pratama Madya Bogor yang diresmikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 1 Oktober 2018.

Kanwil DJP Jawa Barat III saat pertama kali terbentuk hingga tanggal 21 Oktober 2015 dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil, yakni Bapak Angin Prayitno Aji. Kemudian di tanggal 22 Oktober 2015, Bapak Mohammad Isnaeni secara resmi menjabat sebagai Kepala Kanwil hingga 20 September 2018. Dan pada tanggal 21 September 2018, Ibu Dra. Catur Rini Widosari dilantik sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III sampai sekarang.

Kanwil DJP Jawa Barat III saat terbentuk pertama kali berlokasi di Jalan KH. Soleh Iskandar No.88, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor. Menempati sebuah gedung sewaan seluas +/- 4.423 m² dengan 4 lantai dan 1 lantai *basement*. Kemudian, per tanggal 1 Agustus 2016, Kanwil DJP Jawa Barat III berpindah Kantor ke Museum Etnobotani Bogor, Gedung Herbarium Bogoriense Jl. Ir. H. Djuanda No. 22, Bogor. Di gedung baru tersebut, Kanwil hanya menempati lantai 3 dan 4. Dan pada tanggal 11 Januari 2021, Kanwil DJP Jawa Barat III menempati gedung baru di Jl. Ir. H. Djuanda No. 64, Paedang, Bogor Tengah. Gedung setinggi enam lantai bernuansa *heritage* ini ditempati tiga kantor sekaligus yakni Kanwil DJP Jawa Barat III, KPP Pratama Bogor dan KPP Madya Bogor.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana di bidang perpajakan;
3. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalan potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
5. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
6. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;

7. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan;
8. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;
10. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
12. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
13. Pelaksanaan urusan bantuan hukum;
14. Pelaksanaan administrasi kantor;
15. Tugas-tugas lainnya yang terkait dengan tupoksi Direktorat Jenderal Pajak.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut ini hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Objek penelitian ini adalah variabel-variabel makro ekonomi yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi per bulan dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019). Variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini digunakan sebagai variabel independen. Variabel independen adalah variabel bebas yang diduga dapat mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai per bulan. Unit analisis dalam penelitian adalah organisasi dengan lokasi penelitiannya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.64, RT.01/RW.13, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122. Sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder penerimaan PPN diperoleh dari Humas Kanwil DJP Jawa Barat III, dan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara mengunduh data melalui situs internet resmi badan pusat statistik (BPS) seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III. Yaitu BPS Kabupaten Bogor (bogorkab.bps.go.id), BPS Kota Bekasi (bekasikota.bps.go.id), BPS Kota Bogor (bogorkota.bps.go.id), BPS Kota Depok (depokkota.bps.go.id), serta Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (jabar.bps.go.id). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan dalam *nonprobability sampling* adalah *sampling* jenuh di mana penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 3 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 36 buah.

4.2.1. Data Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus (M. Natsir, 2014:253). Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Berikut ini data inflasi pertahun pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III periode 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Data Inflasi pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

	2017	2018	2019	Rata-rata
Kabupaten Bogor	4,26%	2,21%	3,19%	3,22%
Kota Bekasi	3,01%	4,23%	4,28%	3,84%
Kota Bogor	3,69%	3,10%	3,19%	3,33%
Kota Depok	3,93%	2,86%	3,29%	3,36%
Max	4,26%	4,23%	4,28%	
Min	3,01%	2,21%	3,19%	
Rata-rata Pertahun	3,72%	3,10%	3,49%	

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa nilai Inflasi pada empat wilayah yang termasuk dalam wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III. Dapat dilihat, pada tahun 2017 Kabupaten Bogor mengalami tingkat Inflasi tertinggi yaitu 4,26%, dan Kota Bekasi mengalami tingkat Inflasi terendah sebesar 3,01% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 3,72%. Kemudian pada tahun 2018 Kota Bekasi mengalami tingkat Inflasi tertinggi sebesar 4,23% dan Kabupaten Bogor mengalami tingkat Inflasi terendah sebesar 2,21% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 3,10%. Dan pada tahun 2019 Kota Bekasi kembali mengalami tingkat Inflasi tertinggi sebesar 4,28% sementara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor mengalami tingkat Inflasi terendah sebesar 3,19% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 3,49%.

4.2.2. Data Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Budiono 2013). Berikut ini disajikan data pertumbuhan ekonomi pertahun pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III periode 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Data Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

	2017	2018	2019	Rata-rata
Kabupaten Bogor	5,92%	6,19%	5,85%	5,99%
Kota Bekasi	2,47%	3,15%	2,40%	2,67%
Kota Bogor	6,12%	6,14%	6,04%	6,10%
Kota Depok	2,60%	3,01%	3,41%	3,01%
Max	6,12%	6,19%	6,04%	
Min	2,47%	3,01%	2,40%	
Rata-rata Pertahun	4,28%	4,62%	4,43%	

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada empat wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III. Dapat dilihat, pada tahun 2017 Kota Bogor mengalami Pertumbuhan Ekonomi tertinggi mencapai 6,12%, dan Kota Bekasi mengalami Pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar 2,47% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 4,28%. Kemudian pada tahun 2018 Kabupaten Bogor mengalami Pertumbuhan Ekonomi tertinggi sebesar 6,19% dan Kota Depok mengalami Pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar 3,01% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 4,62%. Dan pada tahun 2019 Kota Bogor kembali mengalami Pertumbuhan Ekonomi tertinggi sebesar 6,04% sementara Kota Bekasi juga tetap mengalami Pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar 2,40% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 4,43%. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor pada periode 2017-2019 mencapai rata-rata 6,10%, sementara rata-rata terendah adalah Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi dengan nilai rata-rata Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,67%.

4.2.3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan di dalam negeri (di dalam daerah pabean), dengan demikian PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dan dikenakan pada setiap rantai produksi dan industri (Waluyo, 2011:9). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Berikut ini, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III periode 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp5.584.057.825.000	Rp6.069.469.329.072
2018	Rp7.632.974.001.000	Rp10.418.307.818.895
2019	Rp11.892.475.101.000	Rp11.664.310.458.876

Berdasarkan data penerimaan PPN yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III pada tabel di atas, terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan PPN selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, hanya pada tahun 2017 dan 2018 saja realisasi penerimaan PPN yang mampu mencapai dan melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2017, target penerimaan PPN adalah Rp5.584.057.825.000, dan realisasi penerimaan PPN yang diperoleh sebesar Rp6.069.469.329.072. Pada tahun 2018, target penerimaan PPN adalah Rp7.632.974.001.000, dan realisasi penerimaan PPN yang diperoleh sebesar Rp10.418.307.818.895. Sementara pada tahun 2019, realisasi penerimaan PPN sebesar Rp11.664.310.458.876 tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan yaitu Rp11.892.475.101.000.

4.3. Analisis Data

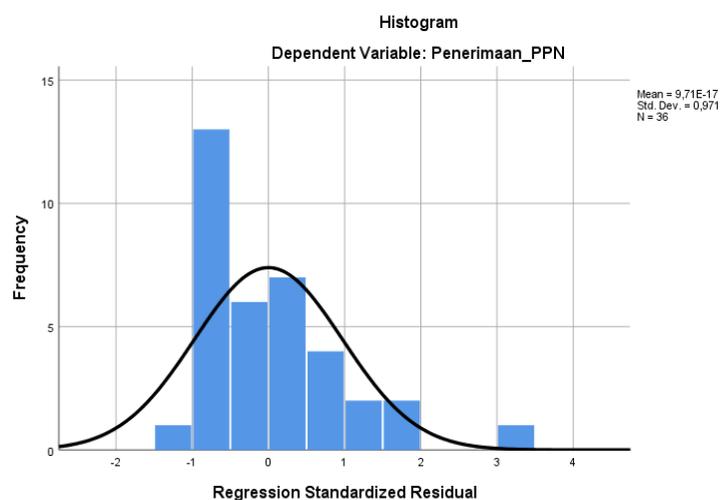
Dalam menguji “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)” dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 25. Adapun indikator variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

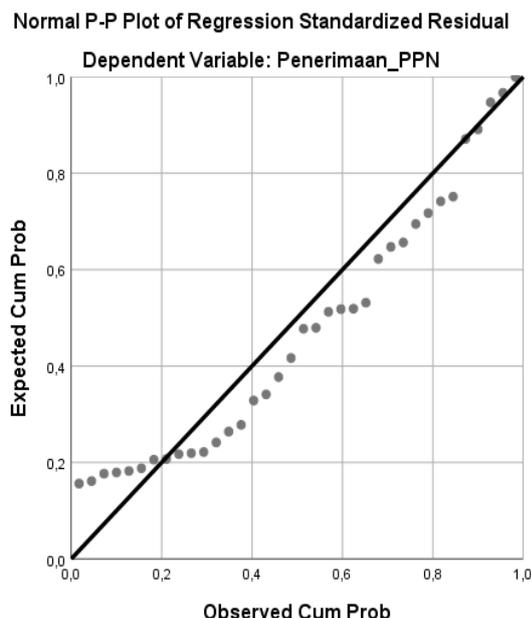
1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot*.



Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021

Gambar 4. 1 Hasil uji Normalitas Histogram Sebelum Transformasi Data



Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Gambar 4. 2 Hasil uji Normalitas Normal Probability Plot Sebelum Transformasi Data

Gambar histogram memperlihatkan bahwa grafik berbentuk lonceng (*bellshaped*) dan gambar normal *probability plot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, data residual seperti terdistribusi dengan normal. Berdasarkan kedua hasil uji normalitas di atas, terlihat bahwa data dalam penelitian ini seperti bersifat normal.

Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poisson*, *uniform*, atau *exponential*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berikut hasil dari uji normalitas, dengan *Kolmogorov-smirnov*.

Tabel 4. 4 Hasil uji Normalitas *Kolmogorov-smirnov* Sebelum Transformasi Data

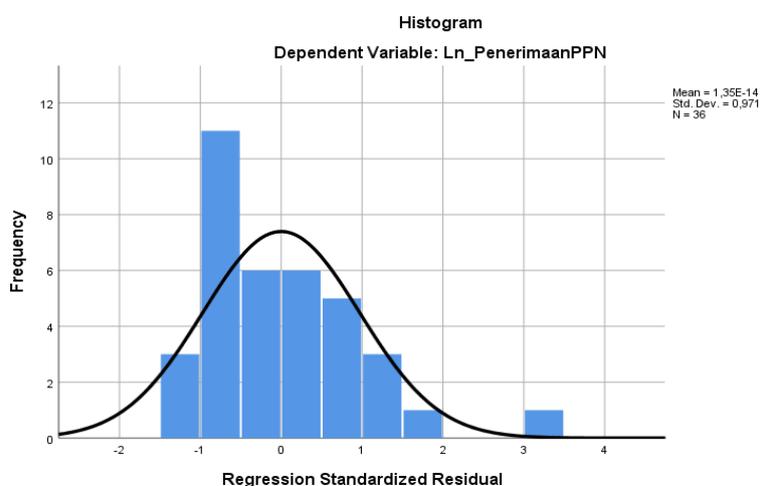
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0001695
	Std. Deviation	269974588877,8 0950000
Most Extreme Differences	Absolute	,149
	Positive	,134
	Negative	-,149
Test Statistic		,149

Asymp. Sig. (2-tailed)	,042 ^c
------------------------	-------------------

- Test distribution is Normal.
 - Calculated from data.
 - Lilliefors Significance Correction.
- Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

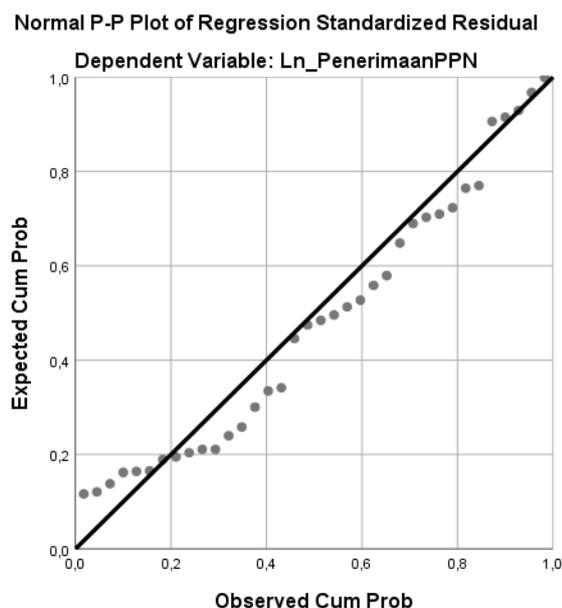
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *asymp. sig. (2-tailed)* adalah 0,042. Hal ini berarti data yang ada di dalam penelitian ini kurang dari kriteria data yang berdistribusi normal. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau probabilitas (*asymp. sig.(2-tailed)*) lebih besar dari 0,05. Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa jika di dalam penelitian terdapat suatu data yang tidak berdistribusi normal maka dapat dilakukan transformasi data agar data yang sebelumnya tidak berdistribusi normal menjadi data yang normal. Dalam melakukan transformasi data maka peneliti harus terlebih dahulu mengetahui bentuk grafik histogram dari data yang ada, apakah berbentuk *moderate positive skewness*, *subtansial positive skewness*, *severe positive skewness* dengan bentuk L, *moderate negative skewness*, *subtansial negative skewness* dan *severe negative skewness* dengan bentuk J.

Oleh karena data yang ada di dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal maka peneliti melakukan transformasi data. Sebelum melakukan transformasi data, peneliti terlebih dahulu melihat variabel apakah (variabel independen atau variabel dependen) yang tidak berdistribusi normal di dalam penelitian ini kemudian selanjutnya dengan melihat bentuk dari grafik histogramnya untuk menentukan bentuk transformasi data yang akan digunakan. Diketahui, variabel yang tidak berdistribusi normal yaitu variabel inflasi (X1) karena memiliki nilai minus/negatif pada saat terjadi deflasi. Dengan bentuk grafik histogram yaitu *subtansial positive skewness*. Maka dari itu transformasi logaritma natural (Ln) dapat lebih efektif dilakukan.



Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Gambar 4. 3 Hasil uji Normalitas Histogram Setelah Transformasi Data



Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Gambar 4. 4 Hasil uji Normalitas Normal Probability Plot Setelah Transformasi Data

Gambar histogram dan normal probability plot di atas adalah hasil uji normalitas setelah dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural (Ln). Gambar histogram memperlihatkan bahwa grafik berbentuk lonceng (*bellshaped*), artinya bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Gambar normal *probability plot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Berdasarkan kedua hasil uji normalitas di atas, maka dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini bersifat normal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* di bawah ini:

Tabel 4. 5 Hasil uji Normalitas *Kolmogorov-smirnov* Setelah Transformasi Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,33070976
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,109
Test Statistic		,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
 Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Setelah dilakukan transformasi data, nilai *asympt. sig. (2-tailed)* yang semula adalah 0,042 (Dalam tabel 4.4) berubah menjadi 0,200 (Dalam tabel 4.5). Sesuai dengan kriteria dalam melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau probabilitas (*asympt. sig. (2-tailed)*) lebih besar dari 0,05. Hasil transformasi data yang telah dilakukan menunjukkan nilai *asympt. sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data setelah transformasi telah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi di antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Regresi yang baik akan bebas dari multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Factor (VIF)* pada model regresi. Regresi yang bebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai *tolerance* > dari 0,1 atau nilai VIF < dari 10. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini:

Tabel 4. 6 Hasil uji Multikolinearitas

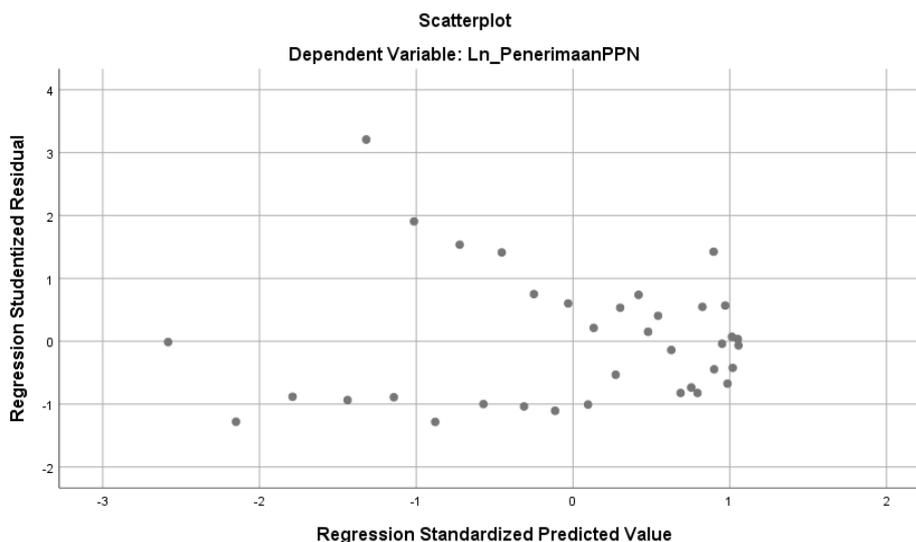
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ln_Inflasi	,914	1,094
	Ln_PertumbuhanEkonomi	,914	1,094

a. Dependent Variable: Ln_PenerimaanPPN
 Sumber: SPSS 25,diolahpenulis, 2021.

Dari hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk kedua variabel lebih dari 0,1 yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,914. Dan untuk nilai VIF kurang dari 10 yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,094. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat *Scatterplot* dan Uji Glejser.



Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Gambar 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik *scatterplot* pada Gambar 4.5 menunjukkan bahwa titik data menyebar tidak membentuk pola di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glejser, jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil uji Glejser

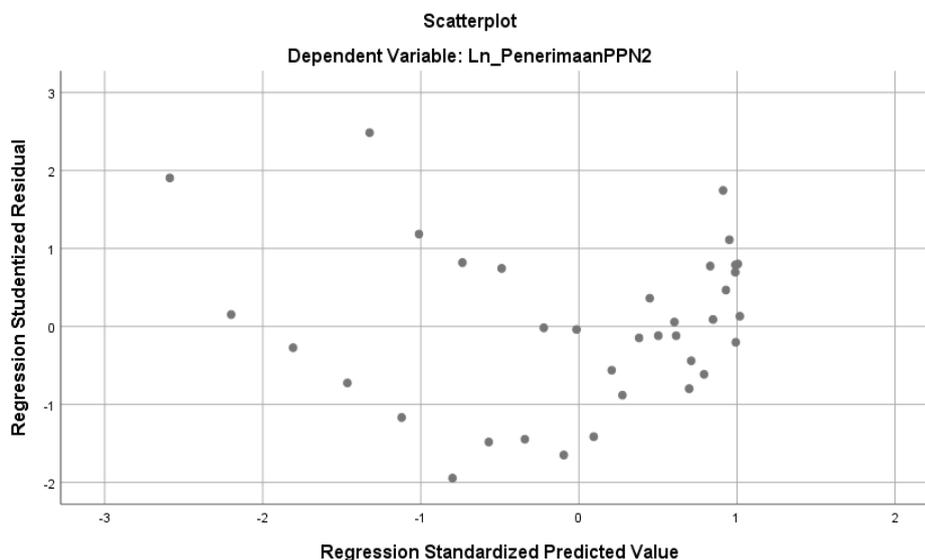
		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2,368	,752		-3,147	,003
	Ln_Inflasi	,359	,207	,269	1,733	,092
	Ln_PertumbuhanEkonomi	-2,478	,723	-,532	-3,425	,002

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glejser diperoleh nilai signifikansi dari Inflasi sebesar 0,092 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,002. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai gejala heteroskedastisitas.

Untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas pada model regresi digunakan metode *Weighted Least Square*. Yaitu model regresi linear dengan pembobot, di mana pembobot didasarkan pada variabel yang menjadi penyebab terjadinya heteroskedastisitas.



Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Gambar 4. 6 Hasil uji Heteroskedastisitas setelah dilakukan metode *Weighted Least Square*

Setelah dilakukan metode *Weighted Least Square* grafik *scatterplot* pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa titik data menyebar tidak membentuk pola di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4. 8 Hasil uji Glejser setelah dilakukan metode *Weighted Least Square*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,636	,532		-1,197	,240
	Ln_Inflasi2	,076	,255	,055	,297	,768
	Ln_PertumbuhanEkonomi2	,889	,469	,354	1,894	,067

a. Dependent Variable: ABS2

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glejser setelah dilakukan metode *Weighted Least Square* diperoleh nilai signifikansi dari Inflasi sebesar 0,768 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,067. Kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan cara melakukan uji Durbin-Watson (DW test). Berdasarkan ketentuan pengujian, model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi apabila $du \leq dw \leq 4-du$.

Tabel 4. 9 Hasil uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 ^a	,980	,978	,37137	,391

a. Predictors: (Constant), Ln_PertumbuhanEkonomi2, Ln_Inflasi2

b. Dependent Variable: Ln_PenerimaanPPN2

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Berdasarkan output tabel 4.9 hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,391. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel alpha 5%, jumlah sampel (n) sebesar 36 dan jumlah variabel independen, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2 ($k=2$). Maka didapatkan nilai tabel *Durbin-Watson* yaitu $du = 1,5872$. Nilai uji uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* sebesar $0,391 < 1,5872$, sehingga dapat dinyatakan terjadi autokorelasi.

Dalam kondisi ini dapat dilakukan tindakan untuk mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*), *Theilnagar*, *Cochrane-Orcutt two-step procedure* dan *durbin's two-step method*. Hal ini bertujuan agar mendapatkan kelompok data yang baru sehingga nantinya mampu mendapatkan output yang diinginkan.

Pada penelitian ini uji autokorelasi yang dilakukan ialah menggunakan *durbin's two-step method*. Hasil uji autokorelasi setelah menggunakan *durbin's two-step method* transformasi data menggunakan bantuan SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Hasil uji Autokorelasi *Durbin's Two-Step Method*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,936 ^a	,875	,867	,00632	1,809

a. Predictors: (Constant), Ln_PertumbuhanEkonomi2@1, Ln_Inflasi2@1

b. Dependent Variable: Ln_PenerimaanPPN2@1

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Berdasarkan tabel *durbin's two-step method*, menunjukkan nilai *durbin-watson* sebesar 1,809 dengan nilai tabel diketahui $dU = 1,5872$. Syarat agar terbebas dari autokorelasi, nilai *durbin-watson* harus berada di antara angka dU dan $4-dU$. Nilai $4-dU = 2,4128$. Dapat diketahui bahwa nilai *durbin-watson* 1,809 berada di antara 1,5872 dan 2,4128, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh variabel dependen Penerimaan PPN yang dipengaruhi variabel independen Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Berikut ini merupakan hasil analisis yang dilakukan dengan SPSS 25 dengan Penerimaan PPN sebagai variabel dependen:

Tabel 4. 11 Hasil uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	31,586	1,424		22,179	,000
	Ln_Inflasi	,021	,392	,008	,054	,957
	Ln_PertumbuhanEkonomi	4,302	1,370	,496	3,141	,004

a. Dependent Variable: Ln_PenerimaanPPN

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel maka dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 31,586 + 0,021 + 4,302 + e$$

Keterangan:

Y	=	Penerimaan PPN
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
X_1	=	Inflasi
X_2	=	Pertumbuhan Ekonomi
e	=	Error

Interpretasi dari persamaan model regresi linier berganda di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 31,586 artinya apabila Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi nilainya nol, maka Penerimaan PPN nilainya sebesar 31,586.
2. Koefisien Regresi Inflasi bernilai positif sebesar 0,021, artinya setiap terjadi kenaikan Inflasi sebesar 1 satuan maka Penerimaan PPN akan mengalami kenaikan sebesar 0,021 dengan asumsi variabel lainnya nilainya tetap.
3. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi bernilai positif sebesar 4,302, artinya setiap terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka Penerimaan PPN akan mengalami kenaikan sebesar 4,302 dengan asumsi variabel lainnya nilainya tetap.

4.3.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis terdiri dari uji koefisien secara parsial (uji t), uji koefisien regresi secara simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi secara parsial untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dengan melihat dari nilai t dan nilai signifikansi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dicari dengan signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $df = 36-2-1 = 33$. Berikut ini hasil uji t dari penelitian ini dengan Penerimaan PPN sebagai variabel dependen.

Tabel 4. 12 Hasil uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	31,586	1,424		22,179	,000
	Ln_Inflasi	,021	,392	,008	,054	,957
	Ln_PertumbuhanEkonomi	4,302	1,370	,496	3,141	,004

a. Dependent Variable: Ln_PenerimaanPPN
Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel, diperoleh hasil t_{hitung} untuk variabel Inflasi sebesar 0,054 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,141. Berikut penjelasan hasil uji t pada semua variabel di atas:

- a. Variabel Inflasi (X1) terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Inflasi memiliki t_{hitung} sebesar 0,054 di mana nilai $t_{hitung} 0,054 < t_{tabel} 2,03452$ dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,957 yang berarti H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki t_{hitung} sebesar 3,141 di mana nilai $t_{hitung} 3,141 > t_{tabel} 2,034520$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,004 yang berarti H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah Inflasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (Y). Variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansinya $<$ dari 0,05. Berikut ini hasil uji f dari penelitian ini:

Tabel 4. 13 Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,265	2	,632	5,451	,009 ^b
	Residual	3,828	33	,116		
	Total	5,093	35			

a. Dependent Variable: Ln_PenerimaanPPN

b. Predictors: (Constant), Ln_PertumbuhanEkonomi, Ln_Inflasi

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Berdasarkan analisis uji F pada tabel dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen memiliki nilai sig $<$ 0,05 yaitu 0,009 dan F_{hitung} sebesar 5,451. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% = 5%, df 1 (jumlah variabel-1) $(3-1) = 2$, dan df 2 (n-k) atau $(36-3) = 33$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,28. Dengan demikian, nilai $F_{hitung} 5,451 > F_{tabel} 3,28$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Determinasi atau ketepatan perkiraan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dari nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil menentukan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut ini hasil perhitungan R^2 dan koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,498 ^a	,248	,203	,34058

a. Predictors: (Constant), Ln_PertumbuhanEkonomi, Ln_Inflasi

b. Dependent Variable: Ln_PenerimaanPPN

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2021.

Hasil tabel menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*std error of the estimate*), antara lain:

- a. R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin kuat. Angka R yang didapat dalam penelitian ini adalah 0,498 yang berarti korelasi antar variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPN sebesar 0,498. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak begitu erat antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. *R square* (R^2) untuk menunjukkan koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel dependen. Nilai *R Square* sebesar 0,248 yang berarti bahwa variabel independen (Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi) mempengaruhi variabel dependen (Penerimaan PPN) sebesar 24,8% dan sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
- c. *Standard error of the estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai *standard error of the estimate* dalam penelitian ini sebesar 0,34058 yang merupakan kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Penerimaan PPN.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 25 dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan), maka disajikan hasil dari hipotesis penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 15 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	F_{hitung}	F_{tabel}	Hasil Uji Hipotesis

Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	0,054	2,03452			Ditolak
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	3,141	2,03452			Diterima
Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai			5,451	3,28	Diterima

a. H1 : Ditolak

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Inflasi memiliki t_{hitung} sebesar 0,054 maka nilai $t_{hitung} 0,054 < t_{tabel} 2,03452$ dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu 0,957. Dapat disimpulkan bahwa Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

b. H2 : Diterima

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki t_{hitung} sebesar 3,141 maka nilai $t_{hitung} 3,141 > t_{tabel} 2,03452$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,004. Dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan demikian hipotesis 2 diterima.

c. H3 : Diterima

Berdasarkan hasil uji F pada tabel dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki $F_{hitung} 5,451 > F_{tabel} 3,28$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.4.1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t yaitu t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu ($0,054 < 2,03452$) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III).

M. Natsir (2014) menyatakan bahwa Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Berdasarkan tingkat pengaruhnya, inflasi yang terjadi pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III adalah inflasi ringan karena besarnya $<10\%$ pertahun, berkisar antara 3% sampai 4% saja. Inflasi yang ringan tidak terlalu berdampak besar hingga mengganggu roda perekonomian. Harga barang dan jasa yang meningkat juga masih dalam batas wajar. Perusahaan penyedia barang dan jasa, serta objek PPN lainnya biasanya memiliki berbagai strategi untuk tetap mempertahankan penjualan di tengah inflasi, seperti menekan biaya produksi, biaya operasional dan biaya pemasaran. Sehingga harga barang dan jasa akan tetap stabil dan tidak mengurangi penjualan. Selain itu, apabila produsen terpaksa menaikkan harga, maka kuantitas barang yang diproduksi akan dikurangi. Hal ini yang menyebabkan penerimaan PPN di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III tetap sama dan tidak mengalami kenaikan pada saat terjadi inflasi.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018) serta Mispityanti dan Ika Neni Kristanti (2017) yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Kurnianingsih (2017), Herna Renata, Kadarisman Hidayat, dan Bayu Kaniskha (2016), Oktiya Damayanti, Suhadak, dan Maria Goretti Wi Endang Nirowati Pamungkas (2016), serta Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto, dan Rosalita Rachma Agusti (2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

4.4.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)

Berdasarkan hasil penelitian, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t yaitu t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $(3,141 > 2,03452)$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, 2011). Pertambahan produksi barang dan jasa yang merupakan objek PPN, disertai dengan peningkatan kemakmuran masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat yang mengakibatkan penerimaan PPN semakin bertambah. Wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III yang sebagian besar merupakan daerah perkotaan, pemukiman dan perdagangan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan

potensi perpajakan yang sangat besar. Semakin tinggi aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada saat perekonomian dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya berdampak baik bagi produsen dan konsumen tetapi juga penerimaan di sektor perpajakan salah satunya penerimaan PPN.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018, Mispiyanti dan Ika Neni Kristanti (2017) dan Oktiya Damayanti, Suhadak, dan Maria Goretti Wi Endang Nirowati Pamungkas (2016) yang menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada penerimaan PPN.

4.4.3. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik uji F untuk variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi diperoleh F_{hitung} sebesar 37,383 dan F_{tabel} 3,59 pada taraf signifikansi 0,05, karena nilai F_{hitung} $5,451 > F_{tabel} 3,28$ maka Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018) yang menyatakan bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis mengenai “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial, Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t di mana nilai $t_{hitung} 0,054 < t_{tabel} 2,03452$ dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu 0,957. Hal ini tidak sesuai dengan H1 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t di mana nilai $t_{hitung} 3,141 > t_{tabel} 2,03452$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,004. Hal ini sesuai dengan H2 yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Secara simultan, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji F di mana Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai $F_{hitung} 5,451 > F_{tabel} 3,28$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,009. Hal ini sesuai dengan H3 yang menyatakan bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini adalah variabel makro ekonomi yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi untuk menjadi bahan pertimbangan demi tercapainya target penerimaan PPN yang telah ditetapkan. Selain itu, melakukan langkah optimalisasi kegiatan ekstensifikasi

dengan menjaring lebih banyak wajib pajak yang dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PPN.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memperhatikan variabel ekonomi makro lainnya yang memiliki peran terhadap penerimaan PPN, seperti Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak agar dapat lebih memaksimalkan atau meminimalisir faktor yang menyebabkan naik atau turunnya penerimaan PPN. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada periode penelitian yang relatif pendek yaitu 3 tahun. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambah periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan memperluas sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aizenman, J., & Jinjark, Y. (2005). The Collection Efficiency of the Value Added Tax: Theory and International Evidence. *NATIONAL BUREAU of ECONOMIC RESEARCH* , 571-610.
- Ajakaiye, D. O. (2000). Macroeconomic effects of VAT in Nigeria: A computable general equilibrium analysis. *AERC Resesarch Paper 92* , 344-371.
- Anugrah, K., Simanjorang, R. C., Hutabarat, A. R., Pakpahan, J. R., & Sipahutar, T. T. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Volume 4. Nomor 2*.
- Audina, A. (2021). *Pengaruh Return On Asset, Price Earning Ratio, dan Debt to Equity Ratioterhadap Harga Saham pada perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2020, April 27). *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2020*. Dipetik Oktober 2, 2020, dari bogorkab.bps.go.id: <https://bogorkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/801a42dcb801f39f4e20910d/kabupaten-bogor-dalam-angka-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2019). *Inflasi (Persen), 2017-2019*. Dipetik Oktober 14, 2020, dari bekasikota.bps.go.id: <https://bekasikota.bps.go.id/indicator/3/1/1/inflasi.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. (2021, Januari 6). *Inflasi (Persen), 2017-2019*. Dipetik Februari 21, 2021, dari bogorkota.bps.go.id: <https://bogorkota.bps.go.id/indicator/3/1/1/inflasi.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2021, Juli 13). *Inflasi (Persen), 2017-2019*. Dipetik Juli 18, 2021, dari depokkota.bps.go.id: <https://depokkota.bps.go.id/indicator/3/1/1/inflasi.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021, Maret 9). *Inflasi Tahunan (Persen), 2008-2020*. Dipetik Juni 17, 2021, dari jabar.bps.go.id: <https://jabar.bps.go.id/indicator/3/46/1/inflasi-tahunan-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021, Mei 27). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran, 2011-2020*. Dipetik Juni 17, 2021, dari jabar.bps.go.id: <https://jabar.bps.go.id/indicator/166/107/1/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-konstan-menurut-pengeluaran.html>
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Ekonometrika Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.

- Boediono. (2014). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Damayanti, O., Suhadak, & Pamungkas, M. G. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, Dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-Negara Asia (Studi pada World Bank Periode 2005-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9 No. 1.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hestanto. (t.thn.). *Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia Menurut Para Cendekiawan*. Dipetik Januari 27, 2021, dari hestanto.web.id: <https://www.hestanto.web.id/pajak/>
- Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. (2020). *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Tahun 2017-2019*. Bogor.
- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2020). *Nota Keuangan beserta APBN TA 2020*. Dipetik November 8, 2020, dari kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2020/>
- Krisnawati, E. (2021, Januari 7). *Mengenal Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi & Daftar Tokoh Pemikirnya*. Dipetik Februari 21, 2021, dari tirto.id: <https://tirto.id/mengenal-teori-teori-pertumbuhan-ekonomi-daftar-tokoh-pemikirnya-f8un>
- Kuznets, S. (2009). Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Journal* , 335-357.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta: Andi .
- Mispiyanti, & Kristanti, I. N. (2017). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS)* , 219-233.
- Murni, A. (2013). *Ekonomika Makro* (Revisi ed.). Bandung: PT. Refika Aditama Anoraga.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, VOL 2.

- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1.
- Pusphita, P. V., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22.2., 1530-1556.
- Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rafinska, K. (2018, November 20). *Mengenal PPN dan Dasar Hukum PPN*. Dipetik Desember 12, 2020, dari online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/dasar-hukum-ppn>
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kanishka, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9 No. 1.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, J. F. (2018, Januari 21). *Cara Interpolasi Data Dengan Menggunakan EViews 9*. Dipetik Desember 9, 2020, dari julfahmisalim.com: <http://www.julfahmisalim.com/2018/01/cara-interpolasi-data-dengan.html?m=1>
- Saretta, I. R. (2020, Juli 16). *Mengenal Apa Itu Pertumbuhan Ekonomi dan Bagaimana Cara Mengukurnya*. Dipetik Maret 7, 2021, dari cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-apa-itu-pertumbuhan-ekonomi-dan-bagaimana-cara-mengukurnya>
- Schenk, A., & Oldman, O. (2001). VAT Acomparative Approach with Materials and Case. *Journal New York Transnational Publisher* , 451-472 .
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations*. Dalam M. Skusen, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*. Jakarta Prenada.
- Smith, A. (2019). *The Wealth of Nations*. (H. Algebra, Penerj.) Globalindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardji, U. (2014). *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Ketiga ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanti, A. (2015). *Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro*. Semarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Krisnafani
Alamat : Kampung Cibeurih, RT/RW 001/001, Desa
Margaluyu, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten
Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 03 Desember 1998
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN 3 Margaluyu
• SMP : SMPN 2 Cipanas
• SMA : SMAN 1 Cipanas
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Januari 2022
Peneliti,

(Dede Krisnafani)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Inflasi perbulan pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Inflasi (%)							
Tahun	Bulan	Kabupaten Bogor	Kota Bekasi	Kota Bogor	Kota Depok	Total	Rata-rata
2017	Januari	0,51	0,80	1,34	0,86	3,51	0,88
	Februari	0,47	0,17	0,34	0,57	1,55	0,39
	Maret	0,44	0,23	0,90	0,05	1,62	0,41
	April	0,41	0,08	0,07	0,22	0,78	0,20
	Mei	0,38	0,27	0,57	0,51	1,73	0,43
	Juni	0,36	0,90	0,63	0,97	2,86	0,71
	Juli	0,33	-0,14	0,14	0,38	0,71	0,18
	Agustus	0,31	-0,10	-0,36	-0,22	-0,37	-0,09
	September	0,29	0,26	0,59	0,01	1,15	0,29
	Oktober	0,27	0,26	0,26	-0,19	0,60	0,15
	November	0,25	0,07	0,41	0,12	0,85	0,21
	Desember	0,23	0,42	0,43	0,61	1,69	0,42
2018	Januari	0,22	0,94	0,67	0,68	2,51	0,63
	Februari	0,21	0,59	0,35	0,29	1,44	0,36
	Maret	0,20	0,66	0,20	0,14	1,20	0,30
	April	0,19	-0,36	0,19	-0,15	-0,13	-0,03
	Mei	0,18	0,55	0,04	0,13	0,90	0,23
	Juni	0,18	0,17	0,65	0,69	1,69	0,42
	Juli	0,17	0,86	0,48	0,03	1,54	0,39
	Agustus	0,17	-0,15	-0,10	0,42	0,34	0,09
	September	0,17	-0,07	-0,26	-0,14	-0,30	-0,08
	Oktober	0,17	0,16	0,24	0,33	0,90	0,23
	November	0,17	0,21	0,39	0,20	0,97	0,24
	Desember	0,18	0,59	0,78	0,22	1,77	0,44
2019	Januari	0,19	0,67	0,39	0,20	1,45	0,36
	Februari	0,20	0,17	-0,40	-0,05	-0,08	-0,02
	Maret	0,21	0,01	0,28	0,24	0,74	0,18
	April	0,22	0,35	0,50	0,49	1,56	0,39
	Mei	0,23	1,05	0,58	0,89	2,75	0,69
	Juni	0,25	0,35	0,90	1,11	2,61	0,65
	Juli	0,26	0,63	0,14	0,05	1,08	0,27
	Agustus	0,28	0,37	0,37	0,36	1,38	0,35
	September	0,30	-0,06	-0,48	-0,25	-0,49	-0,12
	Oktober	0,33	-0,08	0,16	-0,09	0,32	0,08
	November	0,35	0,37	0,24	0,13	1,09	0,27
	Desember	0,38	0,38	0,30	0,18	1,24	0,31

Sumber: Eviews 10, diolah penulis, 2021.

Lampiran 2. Data Pertumbuhan Ekonomi perbulan pada Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Pertumbuhan Ekonomi (%)							
Tahun	Bulan	Kabupaten Bogor	Kota Bekasi	Kota Bogor	Kota Depok	Total	Rata-rata
2017	Januari	0,47	0,14	0,51	0,20	1,32	0,33
	Februari	0,47	0,16	0,51	0,20	1,34	0,34
	Maret	0,48	0,17	0,51	0,21	1,37	0,34
	April	0,48	0,18	0,51	0,21	1,39	0,35
	Mei	0,49	0,20	0,51	0,21	1,41	0,35
	Juni	0,49	0,21	0,51	0,22	1,42	0,36
	Juli	0,50	0,22	0,51	0,22	1,44	0,36
	Agustus	0,50	0,22	0,51	0,22	1,46	0,36
	September	0,50	0,23	0,51	0,22	1,47	0,37
	Oktober	0,51	0,24	0,51	0,23	1,49	0,37
	November	0,51	0,25	0,51	0,23	1,50	0,37
	Desember	0,51	0,25	0,51	0,23	1,51	0,38
2018	Januari	0,51	0,26	0,51	0,24	1,52	0,38
	Februari	0,52	0,26	0,51	0,24	1,53	0,38
	Maret	0,52	0,26	0,51	0,24	1,53	0,38
	April	0,52	0,27	0,51	0,24	1,54	0,38
	Mei	0,52	0,27	0,51	0,25	1,54	0,39
	Juni	0,52	0,27	0,51	0,25	1,55	0,39
	Juli	0,52	0,27	0,51	0,25	1,55	0,39
	Agustus	0,52	0,27	0,51	0,26	1,55	0,39
	September	0,52	0,26	0,51	0,26	1,55	0,39
	Oktober	0,51	0,26	0,51	0,26	1,55	0,39
	November	0,51	0,26	0,51	0,26	1,54	0,39
	Desember	0,51	0,25	0,51	0,27	1,54	0,39
2019	Januari	0,51	0,25	0,51	0,27	1,54	0,38
	Februari	0,51	0,24	0,51	0,27	1,53	0,38
	Maret	0,50	0,24	0,51	0,27	1,52	0,38
	April	0,50	0,23	0,51	0,28	1,51	0,38
	Mei	0,50	0,22	0,51	0,28	1,50	0,38
	Juni	0,49	0,21	0,50	0,28	1,49	0,37
	Juli	0,49	0,20	0,50	0,29	1,48	0,37
	Agustus	0,48	0,19	0,50	0,29	1,46	0,37
	September	0,48	0,18	0,50	0,29	1,45	0,36
	Oktober	0,47	0,16	0,50	0,29	1,43	0,36
	November	0,47	0,15	0,50	0,30	1,41	0,35
	Desember	0,46	0,14	0,50	0,30	1,39	0,35

Sumber: Eviews 10, diolah penulis, 2021.

Lampiran 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Bulan	Tahun		
	2017	2018	2019
Januari	Rp445.513.560.005	Rp922.107.645.007	Rp1.024.727.414.030
Februari	Rp325.762.218.361	Rp633.037.101.168	Rp662.791.086.321
Maret	Rp392.152.778.002	Rp646.237.240.919	Rp785.672.054.660
April	Rp411.790.725.101	Rp749.590.142.331	Rp841.383.771.607
Mei	Rp438.505.979.842	Rp863.780.542.814	Rp915.682.314.158
Juni	Rp411.648.622.554	Rp706.390.090.890	Rp801.923.850.805
Juli	Rp470.582.609.670	Rp771.525.797.708	Rp888.541.543.506
Agustus	Rp493.560.202.685	Rp902.199.855.909	Rp896.128.018.010
September	Rp493.214.091.191	Rp873.669.199.231	Rp1.049.536.388.208
Oktober	Rp531.653.881.216	Rp906.616.231.073	Rp1.050.465.810.226
November	Rp643.799.856.446	Rp1.060.592.134.542	Rp1.128.886.176.468
Desember	Rp1.011.284.803.999	Rp1.382.561.837.303	Rp1.618.572.030.877
Total	Rp6.069.469.329.072	Rp10.418.307.818.895	Rp11.664.310.458.876

Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat III, data diolah penulis, 2021.